## KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 0066/I5.18/KS.01.00/2024

TAHUN 2024 TENTANG

## KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang	a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat
	diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
	b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat
	dan terbatas;
	c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
	Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis
	atas setiap kebijakan yang diambil; dan
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
	dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
	menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
	Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang
	Dikecualikan.
Mengingat	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang         Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir         dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang         Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun         2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang         Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik         Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran         Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang         Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang         Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik         Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran         Negara Republik Indonesia Nomor 5149);</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang         Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik         Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran         Negara Nomor 1);</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017</li> </ol>



tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).
MEMUTUSKAN:
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi NTB ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Mataram
pada tanggal 17 Januari 2024
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi NTB,  Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.  NIP 198103092006042002



